



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 300.05/Kep.341-Kesbangpol/2023

TENTANG

TIM INVESTIGASI PENYELESAIAN MASALAH PONDOK PESANTREN
AL ZAYTUN DI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan fasilitasi dalam penanganan isu konflik sosial terkait Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Investigasi Penyelesaian Masalah Pondok Pesantren Al Zaytun di Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9BEAD1327F>

9BEAD1327F

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Investigasi Penyelesaian Masalah Pondok Pesantren Al Zaytun di Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Tim Investigasi, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok melaksanakan investigasi terhadap isu konflik sosial terkait Pondok Pesantren Al Zaytun di Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Investigasi mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan data/informasi/dokumen terkait pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaytun;
 - b. validasi dan analisis terhadap data/informasi/dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. penyusunan rencana tindak penanganan dalam hal teridentifikasi adanya permasalahan dalam pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaytun; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, dan masyarakat.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Investigasi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.



KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

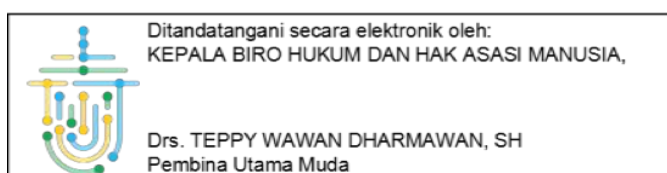
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juni 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



9BEAD1327F

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9BEAD1327F>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 300.05/Kep.341-Kesbangpol/2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

TENTANG : TIM INVESTIGASI
PENYELESAIAN MASALAH
PONDOK PESANTREN AL
ZAYTUN DI DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
5. Panglima Kodam III Siliwangi.
6. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- Ketua : Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Pjraja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Arief Nadjemudin S.H., M. Hum. (Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).



9. Suherman, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
10. Aditya Putra Perdana, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
11. H. Diky Mohamad Syafei, S.Pd. M.A.P (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
12. Herry Mulyawan, S.Pd. M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.
14. Komandan Sub Satuan Tugas pada Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia.
15. Kepala Subbagian Hukum dan Kerukunan Beragama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
16. Ketua Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat.
17. Sandi Rozali Nursubha, S.H., M.H. (Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).
18. Iwa Kustiwa S.H., M.H. (Agen Madya pada Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Jawa Barat).
19. Timbul Mangasi, S.T. (Koordinator Wilayah Indramayu pada Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Jawa Barat).
20. Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat.
21. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat.
22. Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PERSIS) Provinsi Jawa Barat.
23. Pimpinan Wilayah Mathla'ul Anwar Provinsi Jawa Barat.
24. Pimpinan Wilayah Persatuan Umat Islam (PUI) Provinsi Jawa Barat.
25. Pimpinan Wilayah Syarikat Islam (SI) Provinsi Jawa Barat.



26. Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Jawa Barat.
27. Pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Barat.
28. Pimpinan Al Irsyad Provinsi Jawa Barat.
29. KH. Athian Ali, MC (Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia).
30. KH. Badar Ismail (Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Banjar).
31. KH Nur Apipudin (Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Huda Banjar).
32. Dr. KH. Pepep Puad Muslim, M.Si (Pimpinan Pondok Pesantren Azzarnujiyyah Pusat Tasikmalaya.)
33. KH. Husni Mubarak, M.Pd (Pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Tasikmalaya).
34. KH. Rd Hilal Faridz Turmudi (Pimpinan Pondok Pesantren KH Rd Mumu Turmudzi Pangandaran).
35. KH. Aef Saefudin (Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan Cimahi).
36. H. Mochammad Alwi, S.Ag, M.Si (Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Alawiyah Bogor).
37. KH Zamzami Amin (Pimpinan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon).
38. KH. Bahrudin Thoyib, MM (Pimpinan Pondok Pesantren Assalamah Depok).
39. KH. Abdul Ghoni, SH (Pimpinan Pondok Pesantren al Kindi Depok).
40. KH. Mustopa (Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Cirebon).
41. KH. Zaenudin (Pimpinan Pondok Pesantren Al Muthmainnah Cianjur).
42. KH Endang (Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahirin Cimahi).
43. Umar Abdul Ajij H (Pimpinan Pondok Pesantren Daaruni'am Kab Bandung).
44. KH. Moh Yasin, LC (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fath Jalen Bekasi).
45. KH. Suryadi Zaini, M.Pd (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fitroh Indonesia Bekasi).
46. KH. Dr Moh Ais, SH, M.Hum (Pimpinan Pondok Pesantren Anida Ala Islamy Bekasi).
47. KH. Islam Anwar, MA (Pimpinan Pondok Pesantren Alhidayah Nurul Ummah Bekasi).



48. Hilman Umar Basori (Pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Garut).
49. Ceng Alwi (Pimpinan Pondok Pesantren Galumpit Garut).
50. Ust Dr Zamzami, MA (Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Indramayu).
51. KH. Jafar Sodiq (Pimpinan Pondok Pesantren Annidhom Cirebon).
52. KH. A. Bundari Abbas (Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Falah AL Hasanah Bogor).
53. KH. Dr. Aim Zaimuddin, MA (Pimpinan Pondok Pesantren Al Fatmahiyah Bogor).
54. KH. Aceng Dudung (Pimpinan Pondok Pesantren Al Burhan Bandung).
55. KH. Lilip Abdul Khalik (Pimpinan Pondok Pesantren Assalafiyah 1 Sukabumi).
56. Dr.KH. Abu Bakar, M.Ah (Pimpinan Pondok Pesantren Almasthuriyah Sukabumi).
57. KH. Ahmad Haidar (Pimpinan Pondok Pesantren Dar Attaubah Bandung).
58. KH. Tatang Syuhabudin (Pimpinan Pondok Pesantren Annihayah Karawang).
59. KH. Juhyar, S.Pd.I, MA (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah Al Huda Karawang).
60. KH. Syatibi (Pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqomah Kebondanas Subang).
61. KH. Asep Sujai (Pimpinan Pondok Pesantren Cintawana Singaparna Tasikmalaya).
62. Lili Ahmad Hariry (Pimpinan Pondok Pesantren Mubarokul Huda Kab Bandung).
63. KH. Tubagus Rahmat Rifqi (Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Buntet Cirebon).
64. KH. Akhfaz Fauzi (Pimpinan Pondok Pesantren Al ' Asngari Purwakarta).
65. KH. Bahir Muhlis (Pimpinan Pondok Pesantren Al Irpan Purwakarta).
66. KH. Drs Saeful Ujun (Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ridwan Ciamis).
67. KH. Saeful Ulum, S.Ag, M.Si (Pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Cianjur).
68. Drs. KH. Hilman Farid (Pimpinan Pondok Pesantren Sumur Kembang Kabupaten Bandung Barat).
69. Dr. KH A. Rifqi Fiqi (Pimpinan Pondok Pesantren Islamiyah Kabupaten Bandung Barat).
70. KH. Ahsan Taqwim (Pimpinan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Heuleut Majalengka).



71. KH. Ujang Eri (Pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Muftadiin Majalengka).
72. KH. Maman Fathurrahman (Pimpinan Pondok Pesantren Aminatuzzahro Majalengka).
73. KH. Dr. Athoilah (Pimpinan Pondok Pesantren As Sa adah Sukasari Sumedang).
74. Dr. KH Asep Mustofa Kamal, M.Ag (Pimpinan Pondok Pesantren ulumul Quran Al Mustofa).
75. KH. TB Muhyidin (Pimpinan Pondok Pesantren Al Kalifah Bogor).
76. Ust Tedi Andika (Pimpinan Pondok Pesantren Sandrem Gantar Indramayu).
77. KH. Ahmad Zaini Dahlan (Pimpinan Pondok Pesantren Kempek Cirebon).
78. KH. Dr. Fadlil Yani Ainusyamsi, MBA., M.Ag (Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis).
79. KH. Aep Saeful Millah (Pimpinan Pondok Pesantren Asy Syifa Kuningan).
80. KH. Endang Syamsuddin (Pimpinan Pondok Pesantren Syamsul Huda Sengkahan Kuningan).

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 300.05/Kep.341-Kesbangpol/2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

TENTANG : TIM INVESTIGASI
PENYELESAIAN MASALAH
PONDOK PESANTREN AL
ZAYTUN DI DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

I. Pembina:

memberikan pembinaan pelaksanaan investigasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

II. Pengarah:

- a. melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arahan kebijakan pelaksanaan investigasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; dan
- b. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait implementasi pelaksanaan investigasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

III. Ketua:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan investigasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- b. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Investigasi Penyelesaian Masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Investigasi Penyelesaian Masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

IV. Sekretaris:

- a. membantu Ketua menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan investigasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- b. membantu Ketua melaksanakan koordinasi rencana kegiatan Tim Investigasi Penyelesaian Masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; dan
- c. menyusun laporan Tim Investigasi Penyelesaian Masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

V. Anggota:

- a. melaksanakan investigasi terhadap permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- b. melaksanakan investigasi terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- c. melaksanakan investigasi terhadap aktivitas masyarakat, dan/atau organisasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat; dan



- d. mengoordinasikan pelaksanaan investigasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan Dinas/Instansi/Lembaga.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan investigasi terhadap masalah Pondok Pesantren Al Zaytun Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

